



STRATEGI DIPLOMASI KEBUDAYAAN INDONESIA UNTUK MENINGKATKAN PENGARUH GLOBAL

Shanti Dwi Kartika*

Abstrak

Diplomasi kebudayaan berfungsi sebagai soft power untuk membangun citra negara dan memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia di era globalisasi. Indonesia memiliki potensi keragaman budaya sebagai aset nasional dan menjadi kekuatan diplomasi jika dikelola dan diekspor sebagai optimasi soft power. Berbagai tantangan signifikan menghambat efektivitasnya, sehingga kebutuhan akan strategi diplomasi kebudayaan menjadi mendesak. Kajian ini bertujuan merumuskan strategi diplomasi kebudayaan untuk meningkatkan pengaruh global Indonesia secara berkelanjutan dalam kerangka konstitusional. Rumusan diplomasi kebudayaan harus komprehensif, adaptif, dan inovatif, dengan fokus pada strategi utama. Strategi prioritas berupa kesadaran budaya sebagai fondasi membangun koneksi dan relasi, serta penguatan regulasi, kelembagaan, dan anggaran untuk landasan kuat terciptanya konsistensi efektivitas diplomasi kebudayaan. Komisi X DPR RI berperan dalam strategi konsistensi melalui reformasi hukum, advokasi dan alokasi anggaran, kolaborasi dan sinergi dengan komisi terkait untuk kebijakan luar negeri dan pariwisata berbasis budaya, serta diplomasi parlemen untuk memperkuat diplomasi kebudayaan dan memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia

Pendahuluan

Diplomasi kebudayaan sebagai *soft power* dapat membangun citra negara, memperjuangkan kepentingan negara, mengenalkan budaya sebagai identitas nasional, dan meningkatkan pengaruh global di era globalisasi. Dengan 1.300 suku dan 700 bahasa, Indonesia memiliki mega diversitas budaya sebagai aset dan kekuatan diplomasi (Suryatmi, 2024). Jika potensi ini dikelola dan diekspor untuk ekspansi *soft power* (Akbar, 2025), akan mendukung pemajuan kebudayaan dan hubungan antarnegara sesuai UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan menjadi fokus dari Kementerian Kebudayaan. Pemanfaatan potensi ini memerlukan dukungan strategi dari Komisi X DPR RI.

Peluang diplomasi kebudayaan semakin meningkat dengan minat global pada budaya Asia dan repatriasi 828 objek dari Belanda dan Prasasti Pucangan dari India (Tito, 2024; Hanifah, 2025). Partisipasi dalam program budaya internasional, seperti *Islamic Arts Biennale* di

*) Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI.
Email: shanti,kartika@dpr.go.id

Jeddah memperkuat pengaruh budaya Indonesia (Purnama, 2025). Meskipun pemerintah aktif mengajukan warisan budaya ke UNESCO, tantangan koordinasi antarlembaga dan diplomasi budaya sporadis menghambat pencapaian *track 1 diplomacy* (Stevanus, 2025; Akbar, 2025). Terbentuknya Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan diharapkan fokus pada diferensiasi diplomasi, sedangkan negara lain di Kementerian Luar Negeri (Akbar, 2025).

Berbagai aspek tersebut menunjukkan perlu strategi adaptif untuk diplomasi kebudayaan. Kajian ini bertujuan merumuskan strategi diplomasi kebudayaan untuk meningkatkan pengaruh global Indonesia secara berkelanjutan dalam kerangka konstitusional.

Strategi Diplomasi Kebudayaan Indonesia

Diplomasi kebudayaan memiliki peranan penting dalam membangun hubungan baik dan citra Indonesia melalui kebudayaan di kancah internasional. Melalui pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan, diplomasi ini tidak hanya bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan nasional tetapi juga membentuk opini publik (Putri, 2023). Sasarannya adalah komunitas lokal, masyarakat internasional, komunitas diaspora, dan lembaga asing, yang masing-masing memainkan peran vital dalam diplomasi dan promosi budaya Indonesia.

Rumusan strategi diplomasi kebudayaan yang efektif, adaptif, dan inovatif mencakup beberapa langkah strategis berikut.

1. Membangun kesadaran budaya penting untuk diplomasi dan promosi. Melalui pengenalan dan penghargaan keragaman budaya Indonesia, dapat tercipta pemahaman lebih mendalam di kalangan masyarakat internasional.
2. Reformasi hukum untuk menciptakan kerangka hukum yang solid dan terintegrasi melalui perubahan undang-undang atau penggantian undang-undang dengan metode *omnibus law* disertai pembentukan satuan tugas khusus lintas sektor dengan Kementerian Kebudayaan sebagai penanggung jawab pengembangan platform digital terpadu, dan integrasi kebudayaan ke dalam kebijakan luar negeri untuk menjadikan kebudayaan Indonesia menjadi *national branding* yang kuat.
3. Transisi dari *track 4 diplomacy* ke *track 1 diplomacy* diperlukan untuk mengurangi dominasi individu/komunitas serta meningkatkan peran diplomasi pemerintah, legitimasi, efektivitas, kredibilitas, dan pengaruh dalam diplomasi kebudayaan Indonesia.
4. Optimalisasi anggaran untuk memastikan efektivitas diplomasi kebudayaan yang dapat dilakukan melalui advokasi anggaran yang berorientasi pada hasil, kemitraan antara sektor publik dan swasta, serta pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan transparan sesuai dengan prioritas agar diplomasi kebudayaan berdampak positif terhadap kepentingan nasional.
5. Pemanfaatan teknologi dalam digitalisasi program kebudayaan guna meningkatkan aksesibilitas budaya Indonesia mengkurasi konten budaya, serta mendorong interaksi dan kolaborasi budaya tanpa batas geografis. Misalnya, memperkenalkan

interaksi dan kolaborasi budaya tanpa batas geografis. Misalnya, memperkenalkan budaya melalui konten kreatif dengan video tutorial batik dan tari tradisional melalui platform YouTube dan TikTok.

6. Program diaspora ambassador untuk mendorong keterlibatan diaspora Indonesia sebagai duta budaya. Diaspora dapat berkontribusi signifikan dalam memperkenalkan budaya Indonesia kepada audiens yang lebih luas secara global melalui festival budaya, seperti Tong Tong Fair di Belanda, pertukaran budaya di Australia, *Indonesia culture expression* di Singapura, dan Komunitas Gandong Maluku California (Marboen, 2025).
7. Penguatan diplomasi budaya melalui festival, pusat kebudayaan, pertukaran budaya, dan *event* internasional seperti G20, *ASEAN Summit*, dan World Expo untuk memamerkan kebudayaan nasional.
8. Merespons globalisasi, diperlukan program yang menonjolkan budaya lokal dan pendidikan multikultural guna memperkuat pemahaman keragaman budaya Indonesia.

Prioritas Strategi Diplomasi Kebudayaan dan Peran DPR RI

Jika merujuk pada pendapat Patricia M. Goff (Putri, 2023), strategi diplomasi kebudayaan dapat dipetakan dalam kategori strategi utama yang terdiri dari koneksi, konsistensi, dan inovasi, dengan berdasarkan skala prioritas. Pendekatan ini menggarisbawahi perlunya integrasi kebijakan untuk memperkuat identitas budaya bangsa, posisi, dan citra Indonesia secara global di tengah peradaban dunia yang terus berkembang. Prioritas tinggi mencakup strategi koneksi yang berfokus pada peningkatan kesadaran budaya serta konsistensi melalui penguatan kebijakan, kelembagaan, dan optimalisasi anggaran. Strategi ini menjadi fondasi utama karena membentuk landasan yang kuat bagi keberlanjutan diplomasi kebudayaan.

Pada tingkat prioritas menengah, strategi koneksi dengan komunitas diaspora menjadi salah satu elemen penting. Program ini bertujuan untuk memperkuat hubungan budaya dengan negara tempat diaspora berada, sehingga budaya Indonesia dapat lebih dikenal dan dihargai di luar negeri. Selain itu, konsistensi dalam transisi dari *track 4 diplomacy* ke *track 1 diplomacy* juga menjadi bagian dari prioritas ini, yang memungkinkan pemerintah mengambil peran lebih aktif dalam diplomasi kebudayaan. Pemanfaatan teknologi dan respons terhadap globalisasi juga termasuk dalam strategi prioritas menengah. Namun, strategi ini memerlukan investasi waktu, sumber daya, serta koordinasi yang signifikan agar implementasinya berjalan optimal dan berdampak jangka panjang.

Sementara itu, strategi prioritas rendah mencakup inovasi dalam penguatan diplomasi budaya melalui festival budaya dan partisipasi dalam event internasional. Meskipun memiliki dampak positif dalam mempromosikan budaya Indonesia, strategi ini cenderung bersifat temporer dan bergantung pada kondisi eksternal seperti biaya penyelenggaraan yang tinggi serta frekuensi keterlibatan yang terbatas. Oleh karena itu, kegiatan tetap

perlu dipertimbangkan dalam kebijakan diplomasi kebudayaan, tetapi dengan perencanaan yang lebih matang agar dampaknya dapat berkelanjutan.

Dukungan strategis dari Komisi X DPR RI berperan kunci dalam memperkuat koneksi dan konsistensi diplomasi kebudayaan. Sesuai dengan Pasal 69 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2014 jo. UU No. 13 Tahun 2019, Komisi X berperan dalam memastikan bahwa kebijakan diplomasi kebudayaan memiliki landasan hukum yang kuat dan terkoordinasi dengan baik. Peran ini mencakup advokasi dalam reformasi hukum melalui metode omnibus law guna menciptakan kerangka hukum yang solid dan terintegrasi. Selain itu, Komisi X juga berperan dalam mengupayakan peningkatan anggaran agar program diplomasi kebudayaan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, Komisi X DPR RI memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan evaluasi berkala guna memastikan efektivitas program serta akuntabilitas anggaran yang dialokasikan untuk diplomasi kebudayaan. Selain itu, peran diplomasi parlemen juga menjadi bagian penting dalam mendukung strategi ini. Kunjungan kerja luar negeri, partisipasi dalam forum internasional, serta kerja sama dengan parlemen negara lain dalam proyek budaya menjadi beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan. Sinergi dengan Komisi I dan Komisi VII juga diperlukan untuk mengintegrasikan diplomasi kebudayaan dengan kebijakan luar negeri serta sektor pariwisata, sehingga implementasinya dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh.

Penutup

Strategi diplomasi kebudayaan Indonesia perlu dirancang secara komprehensif, adaptif, dan inovatif untuk meningkatkan pengaruh global kebudayaan Indonesia secara berkelanjutan dalam kerangka konstitusional. Pemanfaatan keberagaman budaya sebagai aset *soft power* dapat memperkuat citra Indonesia di kancah internasional. Untuk mencapai tujuan ini, strategi yang diterapkan harus mencakup kesadaran budaya, reformasi kebijakan, transisi diplomasi, optimalisasi anggaran, pemanfaatan teknologi, dan keterlibatan diaspora. Setiap langkah strategis tersebut memiliki skala prioritas berbeda, dengan strategi koneksi dan konsistensi sebagai fokus utama untuk membangun fondasi yang kuat.

Komisi X DPR RI berperan dalam mendukung efektivitas strategi diplomasi kebudayaan melalui penguatan regulasi dan advokasi kebijakan anggaran. Peran lain adalah memastikan kebijakan diplomasi kebudayaan mempunyai landasan hukum yang kuat, terkoordinasi, dan didukung oleh anggaran yang memadai. Kolaborasi dengan Komisi I serta Komisi VII dapat memastikan diplomasi kebudayaan terintegrasi dengan kebijakan luar negeri dan sektor pariwisata berbasis budaya. Diplomasi kebudayaan merupakan instrumen yang efektif dalam memperkuat posisi Indonesia di panggung global.

Referensi

- Akbar, M. W. (2025, Januari 13). Membaca alam berpikir Fadli Zon mengenai diplomasi budaya. *Total Politik*. <https://totalpolitik.com/2025/01/13/membaca-alam-berpikir-fadli-zon-mengenai-diplomasi-budaya/>
- Hanifah, P. (2025, Januari 17). Prasasti Pucangan, jejak sejarah yang akan dipulangkan. *Antara*. <https://www.antaranews.com/berita/4591234/prasasti-pucangan-jejak-sejarah-yang-akan-dipulangkan>
- Marboen, A. P. (2025, Januari 22). Konjen LA resmikan komunitas diaspora Gandong Maluku California. *Antara*. <https://www.antaranews.com/berita/4600238/konjen-la-resmikan-komunitas-diaspora-gandong-maluku-california>
- Purnama, S. (2025, Januari 9). Delapan benda bersejarah koleksi Museum NTB tiba di Jeddah. *Antara*. <https://www.antaranews.com/berita/4572978/delapan-benda-bersejarah-koleksi-museum-ntb-tiba-di-jeddah>
- Putri, A. L. (2023). *Strategi diplomasi budaya Indonesia dalam Itaewon Global Village Festival tahun 2022 di Korea Selatan* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya]. https://digilib.uinsa.ac.id/62032/2/Apri%20Lianasari%20Putri_I92219059.pdf
- Stevanus, D. (2025, Januari 4). Pemerintah terus menguatkan diplomasi kebudayaan di forum internasional. *RRI*. <https://www.rri.co.id/nasional/1235296/pemerintah-terus-menguatkan-diplomasi-kebudayaan-di-forum-internasional>
- Suryatmi, V. (2024, September 19). Kebudayaan Indonesia sebagai aset utama dalam menghadapi globalisasi. *Itopiaspaces*. <https://itopiaspaces.com/kebudayaan-indonesia-sebagai-aset-utama-dalam-menghadapi-era-globalisasi/>
- Tito, S. (2024, Desember 16). Serah terima repatriasi objek warisan budaya Indonesia dari Belanda. *Kemdikbud*. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/serah-terima-repatriasi-objek-warisan-budaya-indonesia-dari-belanda/>